

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO HIDUP.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Berpikir.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG SANKSI BAGI PELAKU PENYEBAR BERITA <i>HOAX</i> BERKONTEN PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	15
A. Konsep Tindak Pidana.....	15
1. Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Positif.....	15
2. Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	21
B. Konsep dan Teori Sanksi.....	28
1. Konsep dan Teori Sanksi Menurut Hukum Positif.....	28
2. Konsep dan Teori Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam	30
C. Sanksi Bagi Pelaku Penyebar Berita <i>Hoax</i>	33
1. Sanksi Bagi Pelaku Penyebar Berita <i>Hoax</i> Menurut Hukum Positif.....	33
2. Sanksi Bagi Pelaku Penyebar Berita <i>Hoax</i> Menurut Hukum Pidana Islam	46
D. Sanksi Pidana Pembuat Konten Pornografi	54
1. Sanksi Pidana Pembuat Konten Pornografi Menurut Hukum Positif.....	54

2.	Sanksi Pidana Pembuat Konten Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam	61
E.	Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebar Berita <i>Hoax</i> Berkonten Pornografi	64
1.	Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita <i>Hoax</i> Berkonten Pornografi Menurut Hukum Positif.....	64
2.	Sanksi Pidana Penyebar Berita <i>Hoax</i> Berkonten Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam.....	68
BAB III		70
METODOLOGI PENELITIAN		70
A.	Metode dan Pendekatan Penelitian.....	70
B.	Jenis data.....	79
C.	Sumber Data.....	80
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	81
E.	Teknik Analisis Data	82
F.	Waktu dan Tempat penelitian.....	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG SANKSI BAGI PELAKU PENYEBAR BERITA HOAX BERKONTEN PORNOGRAFI DALAM PASAL 45A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM		84
A.	Sanksi Bagi Pelaku Penyebar Berita <i>Hoax</i> Berkonten Pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	84
B.	Sanksi Bagi Pelaku Penyebar Berita <i>Hoax</i> Berkonten Pornografi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	90
1.	Pengertian <i>Qadzaf</i>	90
2.	Unsur-Unsur <i>Qadzaf</i>	91
3.	Dasar Hukum <i>Qadzaf</i>	92
4.	Syarat-Syarat dalam <i>Qadzaf</i>	93
5.	Pembuktian Terjadinya <i>Qadzaf</i>	96
6.	<i>Qadzaf</i> dalam <i>Maqashid Syari'ah</i>	101
C.	Relevansi Antara Sanksi Penyebar Berita <i>Hoax</i> Berkonten Pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam.....	112
BAB V PENUTUP		122

A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	130

